BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak masa penjajahan Belanda sampai pemulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau suatu perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonomi (*Gemente*) maupun pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat (khususnya kota bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu Bandoeng Sche Electricitiet Maatschappij (BEM), yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan Gemenshap Electricitiet Bedrijf voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen No 213 tanggal 31 Desember1919.

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahn Jepang (1942-1945) pendistribusian tenaga kerja, dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja seluruh Pulau Jawa.

Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Sekarang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda.

UNIT PELAKSANA TEKNIS P3K

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintahan RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pemimpin PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat kecuali DKI Jakarta dan Tangerang.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum milik Negara.

Berdasarkan peraturan Menteri PUTL No.013/PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Milik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah , kemudian berdasarkan pengumuman PLN exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahan Umum Milik Negara menjadi Perusahaan Persero, maka bentuk perusahaan umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 juni 1994 sesuai dengan akte pendirian.

PT. PLN (Persero) atau dengan istilah umum disebut PLN adalah BUMN yang diserahi tugas untuk memerintah dalam menyediakan tenaga listrik ke seluruh Indonesia. P.T PLN (Persero) sebagai agen pembangunan juga mempunyai tugas merintis kegiatan-kegiatan usaha kelistrikkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi. Adapun PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah salah satu unit PT. PLN (Persero) yang dilaksanakan pendistribusian tenaga listrik di Wilayah Jawa Barat.

Sebagai BUMN ynag memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengemban misi sosial disamping mencari keuntungan bagi perusahaan, PT. PLN (Persero) sering mendapat perhatian dan sorotan masyarakat luas. Maka dari itu PT. PLN harus selalu meningkatkan diri terutama dalam hal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sampai saat ini jumlah pelanggan Listrik di PT. PLN Distribusi Jawa Barat telah mencapai empat juta lebih dengan rasio elektrifikasi sebesar 52,7% sebagian besar pelanggan berada di pedesaan di mana dari 6353 desa telah dialiri listrik sebanyak 5324 desa atau 83,80%. Untuk melayani langganan yang tersebar di 13 cabang tersebut, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat mengarahkan tidak kurang dari 40.000 karyawan dan dibantu oleh KUD sebagai mitra kerja di pedesaan.

Tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran PT. PLN (Persero) khususnya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah :

1. Pertumbuhan kebutuhan kelistrikan yang tinggi, lebih dari 15% pertahun.
2. Jumlah dan mutu sumber daya yang masih perlu ditingkatkan.

UNIKOM

3. Masuknya listrik swasta.

Menghadapi tantangan tersebut, PT. PLN (Persero) perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta melakukan langkah-langkah terobosan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat mempunyai struktur organisasi yang mengalami penyempurnaan, akibat adanya pengaruh masukan dari perusahaan ekstern maupun intern perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 28/010/DIR/2001, Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat dipimpin oleh beberapa manajer. Susunan organisasi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, terdiri dari :

I GENERAL MANAGER

General Manager membawahi :

1. MANAGER PERENCANAAAN & PENGEMBANGAN USAHA

Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha membawahi beberapa deputi, antara lain :

- DEPUTI MANAGER PERENCANAAN PERUSAHAAN
  - Perencanaan Korporat
  - Analisa dan Evaluasi Kinerja
  - Statistik dan Lap. Inf Manajemen

- ◆ Juru/Juru Utama

- DEPUTI MANAGER PENDANAAN
  - Sumber Dana
  - Proyeksi Keuangan
  - Alokasi dan Justifikasi Dana Investasi
  - Alokasi dan Justifikasi Dana Operasi
  - Juru/Juru Utama
- KEP. KEPAKARAN
  - Pengembangan Usaha

2. MANAGER OPERASI

- DEPUTI MANAGER PENGEMBANGAN SISTEM
  - Perencanaan Distribusi
  - Susut Distribusi
- DEPUTI MANAGER PENGENDALIAN OPERASI
  - Supervisor Operasi Distribusi
  - Supervisor Pemelihara Distribusi
- KELOMPOK KEPAKARAN ENGINERING & LOGISTIK
  - ✯ Matering & Proteksi
  - ✯ Scada & Telekomunikasi
  - ✯ P2TL
  - ✯ Peningkatan Kinerja OP
  - ✯ Kualitas Peralatan Listrik
  - ✯ Pengembangan Kontruksi

- ✯ Logistik

3. MANAGER NIAGA

- DEPUTI MANAGER ADMS. NIAGA
  - ✯ Supervisor Transaksi Jual
  - ✯ Sopervisor Transaksi Beli/Antar Unit & Susut
  - ✯ Supervisor Dokementasi Niaga
  - ✯ Juru/Juru Utama
- KELOMPOK KE PAKARAN PENGEMBANGAN PELAYANAN
  - ❖ Unggulan
  - ❖ Reset & Inti.G. Sar
  - ❖ Negosiasi & Transaksi Niaga
  - ❖ Tarip/ Harga
  - ❖ P2TL Penerimaan Niaga
  - ❖ Peningkatan Produktivitas

4. MANAGER KEUANGAN

- DEPUTI MANAGER PENGELOLAAN KEUANGAN
  - 🗁 Penerimaan Dana (I,II,III)
  - 🗁 Kepakaran
  - 🗁 Supervisor Verifikasi
  - 🗁 Supervisor Kas/Giro
  - 🗁 Juru/Juru Utama
- DEPUTI MANAGER PENGENDALIAN ANGGARAN
  - 🗁 Pengendalian Anggaran Operasi

- Pengendalian Anggaran Investasi
- Juru/Juru Utama

- DEPUTI MANAGER AKUNTANSI
  - Supervisor Akuntansi Umum
  - Supervisor Akuntansi Persediaan
  - Supervisor Akuntansi Verifikasi
  - Superfisor Aktiva Tetap
  - Juru/Juru Utama
- KEUANGAN

5. MANAGER ORGANISASI & SDM

- DEPUTI MENAGER ADMINISTRASI SDM
  - Supervisor Tatalaksana SDM
  - Supervisor Kesejahteraan SDM
  - Supervisor Pelaksanaan K3
  - Sistem Inf. SDM
  - Juru/Juru Utama
- DEPUTI MANAGER PENGEMBANGAN SDM
  - Perencanaan Diklat
  - Perencanaan Karir
  - Juru/Juru Utama
- Manajemen SDM

6. MANAGER UMUM

- DEPUTI MANAGER SEKRETARIAT DAN UMUM
  - Supervisor Kesekretariatan & RT Kantor
  - Supervisor Tata Laksana Pengadaan
  - Supervisor Kendaraan
  - Juru/Juru Utama
- DEPUTI MANAGER HUKUM
  - Peraturan perjanjian & Aset
  - Pertimbangan & Bantuan Hukum
  - Juru/Juru/Utama
- DEPUTI MANAGER PUBLIC RELATIAN
  - Eksternal public Relation
  - Internal Public Relation
  - PUKK
  - Juru/Juru Utama
- Sarana & Peralatan Kerja
- Tanah,Gedung & Sarana Penunjang

7. MANAGER TEKNOLOGI INFORMASI

- DEPUTI MANAGER OPERASI TI
  - Pengembangan & Analisa Sistem
  - Aplikasi
  - Jaringan TI
  - Data Base

II KEPALA AUDIT INTERNAL

Kepala Audit Internal membawahi :

- AUDITOR TEKNIK
- AUDITOR MANAJEMEN KEUANGAN
- AUDITOR KHUSUS

2.3 Deskripsi Jabatan

Dengan ditetapkannya organisasi PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 28.K/010/DIR/2001, maka perlu menindaklanjuti tugas pokok dan fungsi organisasi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang menyangkut pelaksanaan teknis dan hal-hal yang berhubungan langsung dengan pengembangan organisasi.

1. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat

1. Mengatur tentang tugas pokok dan tanggung jawab jabatan dibawah manajer di lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sebagai mana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
2. Menetapkan Bagan Susunan Jabatan dibawah manajer sebagaimana dimaksud dalam lampitan 2 keputusan ini.
3. Manajer dapat dibantu oleh jabatan-jabatan pada jenjang jabatan manajerial, supervisor dan atau kepakaran, keteknisan serta operatif dengan sebutan jabatan Deputi Manajer, Supervisor, Ahli, Ahli Madya, Ahli Muda atau Terampil Utama dan Terampil.

2. Auditor Internal

1. Auditor Teknik bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang teknik dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.
2. Auditor Manajemen dan Keuangan bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang manajemen dan keuangan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.
3. Auditor Khusus bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit yang berkaitan dengan masalah khusus dan mutu layanan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha

1. Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan korporat (*business plan*) serta rencana kerja dan anggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
2. Deputi Manajer Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi, melakukan analisa justifikasi investasi serta menyiapkan penerbitan SKKI dan SKKO untuk penyusunan skala prioritasnya.

3. Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan usaha/aliansi usaha sesuai dengan kaidah bisnis yang sehat.

4. Bidang Operasi

1. Deputi Manager Pengembangan Sistem bertanggung jawab atas perencanaan sistem distribusi yang andal dan kebutuhan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan beban serta upaya penurunan susut distribusi (susut teknis).
2. Deputi Manager Pengendalian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem pengoperasian jaringan distribusi berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan operasi yang aman, andal dan efisien.
3. Kelompok Kepakaran Engineering danLogistik, meliputi :
   - ✯ Kepakaran metering dan proteksi bertanggung jawab atas prosedur dan mekanisme, koordinasi sistem proteksi dan metering serta menyiapkan spesifikasi sistem peralatan metering dan proteksi.
   - ✯ Kepakaran scada dan telekomunikasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem operasional telekomunikasi dan scada pada sistem distribusi 20 KV.
   - ✯ Kepakaran pemeriksaan dan penggunaan tenaga listrik (PPTL) bertanggung jawab atas tersedianya program PPTL.
   - ✯ Kepakaran peningkatan kinerja operasi bertanggung jawab atas rekomendasi peningkatan kinerja operasi distribusi.

- ✯ Kepakaran kualitas peralatan listrik bertanggung jawab atas rekomendasi penggunaan peralatan listrik.
- ✯ Kepakaran pengembangan konstruksi bertanggung jawab atas tersedianya standar konstruksi dan spesifikasi teknis untuk rencana pengembangn sistem distribusi.
- ✯ Kepakaran Logistik bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan tentang pola operasional pergudangan untuk kelancaran tersedianya material untuk mendukung pembangunan konstruksi.

5. Bidang Niaga

1. Deputi Manajer Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga dan kontrak bisnis yang dilaksanakan di UPP, UPT/cabang, AREA yaitu transaksi jual/beli/produksi.
2. Kelompok kepakaran Pengembangan sistem Pelayanan yang meliputi :
   - ▭ Kepakaran Bisnis Proses dan Sistem Prosedur Pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana, antar unit pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
   - ▭ Kepakaran Regulasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring/evaluasi untuk rumusan penyempurnaan atau perbaikan standar dan regulasi pelayanan.

- Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.
- Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Umum bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan umum untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.
- Kepakaran Riset Kepuasan Pelanggan bertanggung jawab atas penyelengaraan riset/survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan pelanggan.
- Kepakaran Peningkatan Kompetensi Pelayanan dan Niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut).

3. Kelompok Kepakaran Pengembangan Niaga yang meliputi :
   - Kepakaran Pengembangan Pemasaran dan Produk Unggulan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi/ produk

unggulan untuk pencapaian target penjualan/ pendapatan dan kepuasan pelanggan.

- Kepakaran Riset dan Intelejen Pasar bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dan intelejen pasar untuk mengetahui peta dan rencana pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan / pendapatan dan kepuasan pelanggan.
- Kepakaran Negosiasi dan Transaksi Niaga bertanggung jawab atas pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga/ kontrak bisnis dengan pihak eksternal UBD dan memfasilitasi transaksi niaga kontrak bisnis di unit pelaksana.
- Kepakaran Tarif/ Harga bertanggung jawab atas pembuatan rumusan dan kajian pentarifan/ harga atas transaksi niaga yang dapat menguntungkan perusahaan.
- Kepakaran P2TL/Penerbitan Niaga bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan P2TL Penerbitan Niaga dan rangka pencapaian peningkatan target niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik).
- Kepakaran Peningkatan Produktivitas (EDP) bertanggung jawab atas peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, pendapatan penjualan dan susut tenaga listrik).

6. Bidang Keuangan

1. Deputi Manager Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan monitoring penggunaan dana.
2. Deputi Manager Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dana arus kas secara akurat serta melaksanakan pengembangan sistem manajemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat serta mengelola keuangan yang menguntungkan serta menyiapkan data untuk laporan keuangan.
3. Deputi Manager Akuntansi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dean efektif.
4. Kepakaran Keuangan bertanggung jawab atas merencanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan serta melakukan analisa dan evaluasi keuangan.

7. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Deputi Manager Administrasi SDM bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolumen, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan dan sistem pengelolaan data pegawai yang *up to date* dan penyajian informasi pegawai yang akurat serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

2. Deputi Manager Pengembangan SDM bertanggung jawab atas pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.
3. Kepakaran Manajemen SDM bertanggung jawab atas pengembangan sistem sumber daya manusia.

8. Bidang Umum

1. Deputi Manajer Sekretariat dan Umum bertanggung jawab atas kelancaran operasional bidang kesekretariatan, rumah tangga perkantoran, serta pengelolaan fasilitas dan sarana kerja untuk kantor Unit Bisnis Distribusi.
2. Deputi Manager Hukum bertanggung jawab atas tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan pelanggan, mitra kerja, maupun pihak ketiga, serta mengelola produk hukum yang berupa ketentuan maupun yang berkaitan dengan aset tanah, dan mewakili perusahaan dalam menghadapi persoalan baik di persidangan maupun di luar persidangan.
3. Deputi Manajer *Public Relation* bertanggung jawab atas terpeliharanya citra perusahaan dan terjalinnya hubungan baik antara perusahaan dengan publik eksternal dan internal dan terselenggaranya masa *education* dan *customer education* serta pembinaan dan koordinasi fungsi *public relation* di unit pelaksana dan terlaksananya program PUKK dengan baik.
4. Kepakaran Sarana dan Peralatan Kerja, bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan sarana kerja dan peralatan kerja secara tepat guna dan tepat biaya untuk mendukung kinerja pegawai dan perusahaan.

5. Kepakaran Tanah, Gedung dan Sarana Penunjang bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan bangunan/sarana gedung, tanah dan sarana penunjangnya yang memenuhi syarat secara tepat guna dan tepat biaya.

9. Bidang Teknologi Informasi

1. Deputi Manager Operasi Teknologi Informasi bertanggung jawab atas pengoperasian aplikasi teknologi informasi yang optimal guna tersedianya data yang cepat, akurat dan terpercaya serta mengimplementasikan prosedur operasional yang efisien dan efektif d setiap lini.
2. Kepakaran Pengembangan dan Analisa Sistem bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pengkajian, aplikasi teknologi informasi yang optimal serta melaksanakan analisa dan evaluasi sistem informasi yang digunakan.
3. Kepakaran Aplikasi bertanggung jawab atas ketepatan penerapan dan pembuatan aplikasi serta mensosialisasikan aplikasi yang terpasang guna menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat.
4. Kepakaran Jaringan Teknologi Informasi bertanggung jawab atas ketepatan penerapan dan pembuatan jaringan teknologi serta mensosialisasikan aplikasi yang terpasang guna menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat.
5. Kepakaran Data Base bertanggung jawab atas ketepatan pembuatan dan penggunaan data base dalam mendukung sistem yang diterapkan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menyertakan struktur organisasi di Lampiran.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun1994, tanggal 16 Juni 1994, maka PLN yang semula membentuk Perusahaan Umum (Persero) berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama PT.

Perusahaan listrik negara disingkat PT. PLN (Persero) yang bertujuan :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan menyediakan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
   - Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
   - Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
   - Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha menyediakan tenaga listrik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan maksud dan tujuan PT. PLN (Persero) mengemban misi :

a) Fungsi Bisnis atau Memupuk Keuangan

Sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang.

b) Fungsi Sosial atau Agen Pembangunan

Sebagai pelaksana pembangunan, melakukan kegiatan baik yang bersifat program pembangunan sebagaimana layaknya, maupun yang bersifat sosial

dan perintis dalam rangka peningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak mendatangkan keuntungan. Sebagai perusahaan PT. PLN (Persero) memiliki visi kedepan yaitu Maju, Modern dan Mandiri.

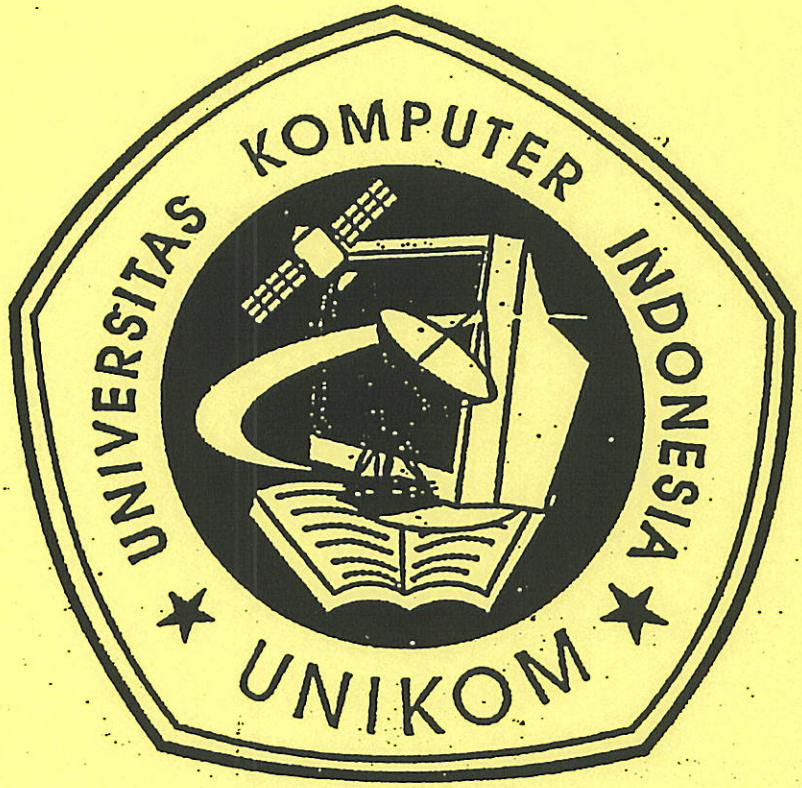
Maju : Dengan pengertian harus mempunyai wawasan bisnis yang mencerminkan unsur-unsur kompetitif, efisiensi dan produktif

Mandiri : Memanfaatkan teknologi maju untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kerja.

Modern : Mampu menentukan arah dan kebijakan untuk melaksanakan misi yang diembannya.

PT. PLN (Persero) Distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkitan dan transmisi. unit ini membelinya dari unit PT.PLN (Persero) lainnya yang diterima di *out going* gardu induk (GI). Seluruh Pulau Jawa yang menyerap hampir 80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh 4 PT. PLN (Perrsero) yang berfungsi sebagai koordinator. Salah satu distribusi tersebut adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat kecuali Tangerang dengan luas wilayah 42.404,36 kilometer kubik dan terdiri dari Perusahaan Daerah Tingkat II yang meliputi 6.353 desa dengan jumlah penduduk 32.644.614 jiwa.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas kegiatan memiliki 15 cabang yang tersebar diseluruh Jawa Barat, dan unit pengatur distribusi, yang dibantu oleh 79 rayon/rantin, 11 sub ranting, 147 kantor jaga dan dibantu oleh 1.057 *payment point* (tempat pembayaran rekening).


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM